

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 DASAR HUKUM**

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 150 ayat (3), serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010, maka pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, harus memuat visi misi dan program kepala daerah terpilih, dan menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Strategis SKPD dan Penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, juga disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 ini, dijelaskan bahwa dalam LKPJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, realisasi dari program dan kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan.

LKPJ yang disusun, memiliki makna sangat strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Karena melalui mekanisme ini, *progress* dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam LKPJ yang disampaikan ini, diuraikan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur terpilih periode 2010–2015, juga dilampirkan penyerapan dana program dan kegiatan SKPD selama tahun 2011, sebagai salah satu bentuk penyebaran informasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kepada publik melalui Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Sejalan dengan itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

## **1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1.2.1 Kondisi Geografis**

#### **1.2.1.1 Letak Wilayah dan Topografi**

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0°45'-2°45' Lintang Selatan dan 101°10'-104°55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 50.160,05 km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.274,95 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas :

|     |                        |                          |           |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------|
| 1)  | Kabupaten Kerinci      | 3.355,27 Km <sup>2</sup> | (6,69%),  |
| 2)  | Kabupaten Bungo        | 4.659 Km <sup>2</sup>    | (9,29%),  |
| 3)  | Kabupaten Tebo         | 6.461 Km <sup>2</sup>    | (2,88%),  |
| 4)  | Kabupaten Merangin     | 7.679 Km <sup>2</sup>    | (5,31%),  |
| 5)  | Kabupaten Sarolangun   | 6.184 Km <sup>2</sup>    | (12,33%), |
| 6)  | Kabupaten Batanghari   | 5.804 Km <sup>2</sup>    | (11,57%), |
| 7)  | Kabupaten Muaro Jambi  | 5.326 Km <sup>2</sup>    | (10,62%), |
| 8)  | Kabupaten Tanjab Barat | 4.649,85 Km <sup>2</sup> | (9,27%),  |
| 9)  | Kabupaten Tanjab Timur | 5.445 Km <sup>2</sup>    | (10,86%), |
| 10) | Kota Jambi             | 205,43 Km <sup>2</sup>   | (0,41%).  |
| 11) | Kota Sungai Penuh      | 391,5 Km <sup>2</sup>    | (0,78%).  |

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2010

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2010 sebanyak 131 Kecamatan dan 1.372 Desa/Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan dan 212 Desa/Kelurahan.

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (Bappeda, 2010):

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 1.1. Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

| Topografi/ Ketinggian<br>(m/dpl) | Luas      |     | Wilayah/<br>Kabupaten                                                                                        |
|----------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Ha        | %   |                                                                                                              |
| 1                                | 2         | 3   | 4                                                                                                            |
| Dataran Rendah<br>(0 - 100)      | 3.431.165 | 67  | Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari.                  |
| Dataran sedang<br>(100 – 500)    | 903.180   | 17  | Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat, |
| Dataran Tinggi (>500)            | 765.655   | 16  | Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo                        |
| Jumlah                           | 5.100.000 | 100 |                                                                                                              |

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2010

#### 1.2.1.2 Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Sepanjang tahun 2011, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 mencapai 3.030 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 4,2 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 27 derajat Celsius, sedangkan untuk dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 22 derajat celcius.

### 1.2.1.3 Penggunaan Lahan

Di luar hutan, penggunaan lahan Provinsi Jambi masih didominasi oleh perkebunan karet dengan kontribusi sebesar 26,20%. Diikuti oleh perkebunan sawit sebanyak 19,22%. Sisanya berturut-turut terlihat pada tabel 1.2 di bawah.

Tabel 1.2 Penggunaan Lahan Tahun 2010

| No            | Jenis Penggunaan      | Luas (Ha)        | Persentase     |
|---------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1             | Lahan Permukiman      | 49,631           | 1.01%          |
| 2             | Sawah Tadah Hujan     | 126,662          | 2.58%          |
| 3             | Tegalan/Ladang        | 117,516          | 2.40%          |
| 4             | Kebun Campuran        | 112,787          | 2.30%          |
| 5             | Kebun Karet           | 1,284,003        | 26.20%         |
| 6             | Kebun Sawit           | 941,565          | 19.22%         |
| 7             | Kebun Kulit Manis     | 93,609           | 1.91%          |
| 8             | Kebun teh             | 4,691            | 0.10%          |
| 9             | Semak dan alang-alang | 87,177           | 1.78%          |
| 10            | Hutan Lebat           | 1,433,470        | 29.25%         |
| 11            | Hutan Belukar         | 413,406          | 8.44%          |
| 12            | Hutan Sejenis         | 187,704          | 3.83%          |
| 13            | Lain-lain             | 47,757           | 0.97%          |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>4,899,978</b> | <b>100.00%</b> |

*Sumber: Hasil Analisis, 2010*

Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter kompleks ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

### 1.2.1.4 Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional

yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
3. Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur.
4. Kawasan strategis Bangko – Sarolangun

Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

1. Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.
2. Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

Untuk luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

## 1.2.2 Demografi

### 1.2.2.1 Penduduk

Menurut BPS (2010), penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 berjumlah 3.092.265 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 61,65 jiwa/km<sup>2</sup> kecuali Kota Jambi sebesar 2.588,99 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Sungai Penuh sebesar 210,20 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebagaimana karakter ibukota Provinsi pada umumnya yaitu sebagai pusat pemerintahan, industri dan perdagangan, maka Kota Jambi juga merupakan daerah tujuan arus migrasi.

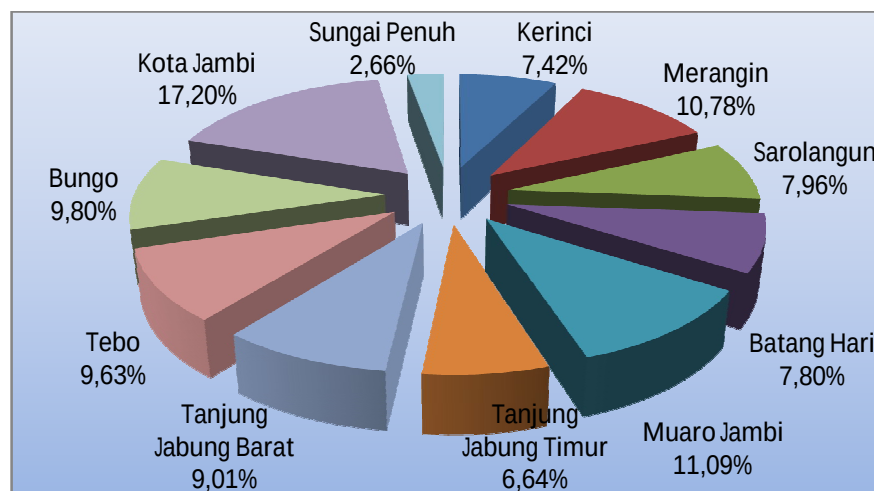
Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka prosentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relative seimbang, yaitu 52% untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48% untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

| No.         | Kabupaten/Kota | Luas Daerah (km2) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1           | Kerinci        | 3.355,27          | 229.495,00      | 68,40                         |
| 2           | Merangin       | 7.679,00          | 333.206,00      | 43,39                         |
| 3           | Sarolangun     | 6.184,00          | 246.245,00      | 39,82                         |
| 4           | Batang Hari    | 5.804,00          | 241.334,00      | 41,58                         |
| 5           | Muaro Jambi    | 5.326,00          | 342.952,00      | 64,39                         |
| 6           | Tanjabtim      | 5.445,00          | 205.272,00      | 37,70                         |
| 7           | Tanjabbar      | 4.649,85          | 278.741,00      | 59,95                         |
| 8           | Tebo           | 6.461,00          | 297.735,00      | 46,08                         |
| 9           | Bungo          | 4.659,00          | 303.135,00      | 65,06                         |
| 10          | Kota Jambi     | 205,43            | 531.857,00      | 2.588,99                      |
| 11          | Sungai Penuh   | 391,50            | 82.293,00       | 210,20                        |
| J u m l a h |                | 50.160,05         | 3.092.265,00    | 61,65                         |

Sumber : Jambi Dalam Angka, 2010.

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Jambi Tahun 2010





### 1.2.2.2 Tenaga Kerja

Indikator keberhasilan dari bidang ketenagakerjaan tergambar dari menurunnya tingkat pengangguran, dimana tingkat pengangguran pada tahun 2010 sebanyak 83.278 orang, menurun menjadi 60.169 orang pada tahun 2011 atau 27,75 dari tahun 2010. Untuk jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 sebanyak 1.545.683 orang, mengalami penurunan menjadi 1.459.167 orang pada tahun 2011. Angka kesempatan kerja pada Provinsi Jambi pada tahun 2010 sebanyak 1.462.405 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 1.434.998 orang. Sedangkan untuk upah minimum Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari Rp900.000,00 pada tahun 2010 menjadi Rp1.028.000,00 di tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp1.142.000,00.

Dilihat dari perkembangan jumlah peserta Jamsostek mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tergambar dari jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek, pada tahun 2010 berjumlah 1.665 perusahaan dengan tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek sebanyak 73.333 orang dan di tahun 2011, jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek sebanyak 1.971 perusahaan dengan tenaga kerja peserta Jamsostek sebanyak 86.772 orang. Dilihat dari jumlah kasus kecelakaan kerja, juga mengalami penurunan dari 880 kasus kecelakaan pada tahun 2010, menjadi 738 kasus di tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa, tingkat kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja mengalami peningkatan.

Tabel 1.4 Perkembangan Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2010

| No | Uraian                                          | Tahun     |            | +/-%    |
|----|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|    |                                                 | 2010      | 2011       |         |
| 1  | Jumlah Penduduk                                 | 3.092.164 | 3.169.814* | 2,51%   |
| 2  | Penduduk Usia Kerja                             | 2.349.742 | 2.209.503  | -5,97%  |
| 3  | Jumlah Angkatan Kerja                           | 1.545.683 | 1.495.167  | -3,27%  |
| 4  | Jumlah Kesempatan Kerja                         | 1.462.405 | 1.434.998  | -1,87%  |
| 5  | Tingkat Pengangguran                            | 83.278    | 60.169     | -27,75% |
| 6  | Persentase Pengangguran dari Angkatan Kerja (%) | 5,39%     | 4,03%      | -25,23% |

Sumber : Jambi Dalam Angka, 2010

\*) data penduduk versi perhitungan Dana Alokasi Umum Tahun 2011

### 1.2.3 Kondisi Ekonomi

#### 1.2.3.1 Potensi Unggulan Daerah

Provinsi Jambi terletak di tengah Pulau Sumatera merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang mempunyai potensi cukup besar tersebut antara lain; perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor bahan pertambangan dan penggalian yang menjadi potensi unggulan daerah adalah batu bara, gas bumi, minyak, tambang mineral lainnya. Sedangkan potensi industri pengolahan di Provinsi Jambi yang potensial untuk dikembangkan terutama untuk pengolahan dengan bahan baku

*Crude Palm Oil (CPO), Crumb Rubber, Virgin Coconut Oil (Vico), Cassiavera,* serta olahan dari produk tanaman pangan dan produk dari ikan.

Bila dilihat dari Komoditi unggulan Provinsi Jambi, maka terdapat 12 komoditi unggulan yang didominasi dari berbagai sub-sektor pertanian antara lain: Karet, Kelapa sawit, Kelapa dalam, Cassiavera, Kopi, Buah-buahan, Pinang, Nenas, Perikanan Laut dan darat dan Peternakan serta hasil pertambangan umum lainnya.

### **1.2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi**

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi pada tahun 2011 meningkat sebesar 8,5% dibanding tahun 2010. Peningkatan ini didukung oleh semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,1%. Pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor Jasa-jasa dengan laju sebesar 3,8%. Perekonomian Provinsi Jambi yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp.63.268 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2011 sebesar Rp.18.962 milyar.

Pada triwulan IV tahun 2011, PDRB Provinsi Jambi tumbuh sebesar 1,2% dibanding triwulan sebelumnya. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 2,4% dan yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan dengan laju sebesar 0,4%.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang sebesar 8,5% didukung oleh sumber pertumbuhan utama pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,8%, diikuti oleh sektor Pertanian sebesar 1,8%. Dilihat dari sisi penggunaan, PDRB Provinsi Jambi tahun 2011 sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 59,9%, Konsumsi Pemerintah 18,3%, Pembentukan Modal Tetap Bruto 18,8%, ekspor 55,8%, serta impor 55,9%. Semua komponen PDRB penggunaan pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor sebesar 22,2% dan terkecil pada komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,7%. Dengan demikian kinerja perekonomian Provinsi Jambi yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, mengalami peningkatan dari 6,36% pada tahun 2009, menjadi 7,3% ditahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 8,5%..

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Jambi pada Triwulan IV tahun 2011 sebesar 106,96. Ini berarti kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya. Membaiknya kondisi ekonomi konsumen ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan rumah tangga dengan nilai indeks 109,52.

Nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Jambi pada triwulan IV tahun 2011 sebesar 106,96. Hal ini memberi gambaran bahwa kondisi ekonomi menurut konsumen telah meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Membaiknya kondisi ekonomi konsumen ini antara lain didorong oleh peningkatan pendapatan rumah tangga dengan nilai indeks sebesar 109,52.



Meningkatnya harga beberapa komoditi makanan pada triwulan IV cukup berpengaruh terhadap pola konsumsi makanan yang terlihat dari nilai indeks sebesar 106,83. Angka ini relatif besar diatas 100 sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan harga komoditi makanan berpengaruh cukup besar pada pembelian konsumsi makanan. Jika dilihat dari total tingkat konsumsi rumah tangga baik makanan maupun non makanan cukup berpengaruh pada triwulan IV tahun 2011, hal ini terlihat dari nilai indeks sebesar 100,66.

Pada Bulan Desember 2011, inflasi Provinsi Jambi sebesar 0,66 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 133,49. Inflasi terjadi pada enam kelompok barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,20%; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,71%; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 0,68%; Kelompok Sandang sebesar 0,16%; Kelompok Kesehatan sebesar 0,23%; serta Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,20%. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tidak mengalami perubahan indeks. Laju inflasi tahun 2011 sebesar 2,76%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 10,52%.

Tabel 1.5. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2011 dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011

| Lapangan Usaha                                               | Atas Dasar Harga Berlaku<br>(Milyar Rupiah) |        | Atas Dasar Harga Konstan<br>(Milyar Rupiah) |        | Laju Pertumbuhan (%) | Sumber Pertumbuhan (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|
|                                                              | 2010                                        | 2011   | 2010                                        | 2011   | 2011                 | 2011                   |
| 1 Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 15.815                                      | 18.566 | 5.263                                       | 5.580  | 6                    | 1,8                    |
| 2 Pertambangan dan Penggalian                                | 9.817                                       | 12.064 | 2.146                                       | 2.642  | 23,1                 | 2,8                    |
| 3 Industri Pengolahan                                        | 5.981                                       | 6.748  | 2.233                                       | 2.348  | 5,1                  | 0,7                    |
| 4 Listrik, Gas dan Air Bersih                                | 488                                         | 555    | 146                                         | 162    | 11,3                 | 0,1                    |
| 5 Bangunan                                                   | 2.447                                       | 2.708  | 835                                         | 888    | 6,3                  | 0,3                    |
| 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran                            | 7.828                                       | 9.476  | 3.047                                       | 3.341  | 9,7                  | 1,7                    |
| 7 Pengangkutan dan Komunikasi                                | 3.519                                       | 4.025  | 1.320                                       | 1.375  | 4,1                  | 0,3                    |
| 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa                               | 2.784                                       | 3.226  | 997                                         | 1.088  | 9,1                  | 0,5                    |
| 9 Jasa – jasa                                                | 5.139                                       | 5.900  | 1.483                                       | 1.539  | 3,8                  | 0,3                    |
| PDRB                                                         | 53.817                                      | 63.268 | 17.471                                      | 18.962 | 8,5                  | 8,5                    |
| PDRB Tanpa Migas                                             | 45.062                                      | 52.609 | 15.677                                      | 16.766 | 6,9                  | 6,9                    |